AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN PEMBINA YAYASAN OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS YANG SUDAH BERAKHIR MASA JABATANNYA*AS A RESULT OF THE LAW ON THE APPOINTMENT OF FOUNDATION GUARDIANS BY MANAGERS AND SUPERVISORS WHO HAVE EXPIRED THEIR TERMS OF SERVICE*

Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa*, Djumikasih, Dyah Widhiawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T Haryono 169 Malang 65145 Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 19 Mei 2023

Disetujui : 10 Juli 2023

Keywords:

foundation organs, the term of office of the management ends, the position of supervisor becomes vacant.

Kata Kunci:

organ yayasan, masa jabatan pengurus berakhir, kekosongan jabatan pembina.

***) Korespondensi:**

E-mail: xlinaputri@student.ub.ac.id

Abstract: The aim of writing the article is to discuss the legal consequences of appointing foundation supervisors by administrators and supervisors whose terms of office have ended. This study is socio legal research using a socio-legal approach. Data collection techniques used interviews and documentation studies, data analysis used qualitative descriptive analysis. The management and supervisors who appointed the supervisors have had their term of office expired so they do not have the authority to make the appointment. The legal consequences that occur are that the position is invalid, the supervisor does not have authority, the legal action taken is invalid, can be sued if someone is harmed, the meeting decision statement is not an authentic deed, personally responsible if there is loss. The appointment of supervisors is in accordance with organ theory, namely that the appointment of supervisors is necessary because they are the highest organ in the foundation and have an important role in making various decisions. Appointment is contrary to the theory of attributive authority and legal certainty. The issuance of a Decree from the Ministry of Law and Human Rights is the reason to justify the validity of the appointment of foundation supervisors.

Abstrak: Artikel ini bertujuan membahas akibat hukum pengangkatan pembina yayasan oleh pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya. Kajian ini merupakan penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengurus dan pengawas yang mengangkat pembina telah habis masa jabatannya sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Akibat hukum yang terjadi adalah jabatan tidak sah, pembina tidak memiliki kewenangan, perbuatan hukum yang dilakukan tidak sah, dapat digugat apabila ada yang dirugikan, pernyataan keputusan rapat bukan sebagai akta otentik, pribadi bertanggung jawab apabila ada kerugian. Pengangkatan pembina sesuai dengan teori organ, yaitu pengangkatan pembina perlu karena merupakan organ tertinggi dalam yayasan dan memiliki peranan penting dalam mengambil berbagai keputusan. Pengangkatan bertentangan dengan teori kewenangan atributif dan kepastian hukum. Penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi alasan pembenar keabsahan pengangkatan pembina yayasan.

PENDAHULUAN

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang memiliki sifat sosial. Istilah yayasan berasal dari terjemahan dari istilah asing dalam bahasa Belanda *stichting* dan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *foundation*. Ciri khas yang membedakan yayasan dengan lembaga yang berbadan hukum lainnya adalah yayasan bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan (Murni & Gani, 2020; Kristianti, 2021). Keistimewaan yayasan sebagai badan hukum adalah tidak memiliki anggota tetapi memiliki organ yang terdapat didalamnya. Harta kekayaan yayasan yang merupakan badan hukum dipisahkan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan pendirian yayasan (Sanjaya, 2016). Pendirian yayasan wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan formal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan badan hukum yayasan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan membentuk lembaga keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang dapat diwujudkan dalam sebuah lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya. Pendapat ahli ada yang menyatakan jika yayasan merupakan badan yang berbentuk nirlaba, yang berarti bertujuan tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat amal. Yayasan dapat didirikan sewaktu pendirinya masih hidup ataupun berdasarkan dengan surat wasiat. Syarat berdirinya yayasan meliputi syarat formil dan materiil. Syarat formil terdiri atas: (a) akta otentik, (b) berbahasa Indonesia, (c) disahkan kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk, dan (d) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Syarat materiil terdiri atas: (a) adanya pemisahan kekayaan, (b) tujuan tertentu, dan (c) berbentuk organisasi (Rido, 2004). Yayasan dalam pembentukannya harus memenuhi berbagai persyaratan dan bertujuan bukan untuk mencari keuntungan.

Yayasan merupakan salah satu badan hukum, tetapi status badan hukum tersebut tidak melekat begitu saja. Status badan hukum didapatkan oleh yayasan adalah ketika yayasan tersebut telah melakukan proses pengesahan dari pemerintah. Faktanya, tidak semua yayasan yang ada dalam masyarakat itu didaftarkan untuk dijadikan badan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Alasan memilih mendirikan yayasan karena

jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya berfokus pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memilih ruang gerak dengan menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti keagamaan, pendidikan, dan kesehatan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lainnya (Kusumastuti, A., & Suhardadi, M., 2003). Kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh yayasan diperkirakan muncul atas kesadaran masyarakat dari kalangan yang mampu dan memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan baik perekonomian maupun dalam hal lainnya.

Pengaturan mengenai badan hukum yayasan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban umum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Pemerintah membentuk hukum positif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan. Pemerintah melalui Undang-Undang Yayasan memberikan pengertian mengenai yayasan yang dijelaskan dalam Pasal 1, yaitu suatu badan hukum yang berdiri dengan kekayaan yang terpisah dan bertujuan dalam bidang sosial, keagamaan serta kemanusiaan dan dalam menjalankan kegiatannya tidak memiliki anggota.

Salah satu yayasan yang berkedudukan di Kota Malang adalah Yayasan Pura Dwijawarsa yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai Yayasan Pura. Yayasan Pura berkedudukan di Jalan Ki Ageng Gribig Gang 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Dusun Buring, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Pada tanggal 7 Februari 1959 didirikanlah Yayasan Pura Dwijawarsa dengan akta notaris nomor 13 yang dibuat di hadapan R. Soeratman, notaris pengganti Malang. Yayasan ini memiliki maksud dan tujuan dalam bidang keagamaan dengan mendirikan dan memelihara Pura (tempat persembahyangan Agama Hindu) pertama di Malang dan di sekitar Malang, dan selanjutnya di tempat-tempat manapun juga di luar Bali di mana ada umat Hindu yang membutuhkan suatu tempat persembahyangan.

Yayasan Pura membuat akta pendirian baru yang dibuat dihadapan notaris pada tanggal 25

April 2008 dengan judul Akta Pendirian Yayasan Pura Dwijawarsa Nomor 29. Kemudian, di tanggal 1 Juli 2008, diadakan perubahan anggaran dasar di depan notaris yang sama, dengan judul Akta Perubahan Nomor 2. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan penggantian anggota pembina dan anggota pengawas yayasan. Yayasan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3760.AH.01.02 Tahun 2008. Dengan demikian, yayasan pura telah memperoleh pengesahan dengan mendapatkan status sebagai badan hukum dari pemerintah.

Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Yayasan Pura Nomor 29 Tanggal 25 April 2008 pada Pasal 1 menetapkan maksud dan tujuan pendirian yayasan untuk tujuan keagamaan. Pencapaian tujuan yayasan dilaksanakan dengan merancang beberapa kegiatan, yaitu: (a) mencari dan membeli tanah yang layak untuk mendirikan pura, (b) mendirikan dan memelihara pura di Malang maupun luar Malang atau luar Bali, (c) mengumpulkan bahan, mendatangkan ahli seni pahat dari Bali, dan lainnya untuk membuat pura sebagai tempat upacara keagamaan Hindu, (d) mengerjakan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan untuk umat Hindu.

Yayasan termasuk salah satu subjek hukum, tetapi bukan tergolong dalam subjek hukum manusia secara alamiah, melainkan subjek hukum yang tergolong badan yaitu badan hukum. Yayasan sebagai subjek hukum badan tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak bisa menjalankan apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Yayasan memerlukan alat perlengkapan berupa manusia alamiah yang bertugas mengurus dan bertindak mewakili badan tersebut. Undang-undang yayasan mengenal tiga jenis organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Tugas dan tanggung jawab pembina, pengurus, dan pengawas selaku organ yayasan bersumber pada sifat yayasan dan keberadaan organ (Wahyono & Margono, 2001). Kewenangan dan kewajiban dari organ yayasan bergantung pada tujuan yayasan.

Permasalahan yang terjadi adalah pembina yayasan yang meninggal dunia dan belum diangkat pembina yang baru. Masa jabatan pembina dalam Pasal 8 angka 1 Anggaran Dasar Yayasan Pura tahun 2008 ditentukan selama selama lima

tahun. Masa berakhir jabatan pembina tahun 2013 dan setelah itu tidak ada penggantian. Pembina baru diangkat pada tahun 2020. Setelah meninggalnya pembina dan berakhirnya jangka waktu menjabat, maka kursi pembina mengalami kekosongan. Pembina merupakan organ yang penting dalam yayasan, karena memiliki kewenangan yang berdasarkan anggaran dasar yayasan tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas. Pengangkatan pembina baru dilakukan melalui mekanisme Rapat Gabungan Yayasan yang dilakukan dihadapan notaris sehingga menghasilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 164 tanggal 29 September 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 53 Tanggal 06 September 2021. Pengangkatan pembina karena kekosongan pembina oleh pengurus dan pengawas dapat dilakukan atas dasar hukum yang terdapat dalam pasal 7 angka 6 anggaran dasar yayasan pura nomor 29 dan pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi “Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus”.

Pengangkatan pembina yayasan dilakukan pengurus dan pengawas yang telah berakhir masa jabatannya di tahun 2013. Periode tahun 2013–2020 yayasan tidak pernah melakukan pembaharuan terhadap organ dan anggaran dasar yayasan. Pengangkatan pembina baru dilaksanakan pada tahun 2020 oleh pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya. Waktu pengangkatan pembina baru melebihi jangka waktu yang ditentukan anggaran dasar yayasan, yaitu 30 hari sejak tanggal kosongnya pembina. Pengangkatan pembina yayasan oleh pengurus dan pengawas yang telah berakhir jangka waktu menjabatnya memiliki akibat hukum tertentu. Tulisan ini bertujuan menganalisis akibat hukum pengangkatan pembina yayasan oleh organ pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya.

METODE

Kajian menggunakan pendekatan sosio legal yaitu terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi pada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis

sosiologis melalui pendekatan perundang-undangan. Studi kasus dilaksanakan pada Yayasan Pura di Kota Malang. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus yayasan dan notaris. Studi dokumentasi dilakukan terhadap akta pendirian yayasan dan akta keputusan rapat tentang pengangkatan pembina yayasan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengangkatan Pembina Yayasan oleh Pengurus dan Pengawas yang sudah Berakhir Masa Jabatannya

Permasalahan Yayasan Pura adalah kekosongan kursi pembina sehingga para pengurus dan pengawas yang masih ada bersepakat untuk melakukan pengangkatan pembina baru. Tetapi permasalahan lain timbul yaitu, pengurus dan pengawas yang melakukan pengangkatan tersebut tidak lagi memiliki kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pura karena berakhirnya masa jabatannya. Pembahasan tersebut akan penulis analisis menggunakan teori organ yang dikemukakan oleh Otto Van Gierke dan teori kewenangan atributif.

Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan memiliki organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas (Siahaan, dkk., 2020). Pasal 28 Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas yayasan. Pembina sebagai organ tertinggi memiliki posisi sentral serta memiliki hak veto. Pembina yayasan dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Apabila jumlah pembina lebih dari satu orang maka salah satunya menjadi ketua pembina yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar yayasan. Anggota pembina ditetapkan melalui pengangkatan yang dilakukan berdasarkan rapat pembina (Handayani, dkk., 2018). Pengangkatan anggota pembina di yayasan yang baru didirikan dapat dilakukan oleh pendiri yayasan. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kesimpulannya pembina

yayasan tidak harus merupakan pendiri yayasan, namun bisa juga orang dari luar yayasan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap maksud dan tujuan yayasan.

Pengurus yayasan merupakan organ eksekutif dalam yayasan yang bertugas melaksanakan kepengurusan yayasan, baik untuk urusan ke dalam maupun ke luar. Pengurus ini dalam kegiatan nyata yayasan merupakan organ yang sangat berat kerjanya. Pengurus menyelenggarakan dokumen-dokumen kegiatan yayasan, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua hal ini dilakukan oleh pengurus yayasan sehingga pengurus memegang peran kunci bagi jalannya yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya (Simamora, 2012). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus yayasan sesuai dengan undang-undang yayasan cukuplah sederhana, yakni orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah usia sudah dewasa dan sehat jiwanya. Tugas pengurus yayasan dan risiko hukum yang ditanggung pengurus cukup berat, karena itu pengurus harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, membuat pembukuan, dan bukan anggota pengawas atau pembina. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, wakil, dan bendahara.

Pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Kedudukan pengawas dalam yayasan merupakan suatu keharusan. Hal ini terlihat dari persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan bahwa dalam suatu yayasan minimal harus ada satu orang yang berkedudukan sebagai pengawas atau lebih dari satu untuk yayasan yang besar. Keberadaan pengawas mengisyaratkan adanya penekanan dari undang-undang agar terdapat satu orang yang mengawasi pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan sehingga tidak terjadi kerugian pada yayasan. Orang yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan

perbuatan hukum, sudah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Undang-undang tidak mengatur persyaratan khusus sebagai pengawas, baik latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, maupun keahlian tertentu. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas yayasan yaitu mampu mengontrol dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pengurus atau pengawas. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta agar tidak merugikan perusahaan.

Permasalahan kekosongan pembina karena telah berakhir masa jabatannya dan juga meninggal dunia sehingga organ pengurus dan pengawas yang masih ada tetapi tidak lagi memiliki kewenangan karena telah berakhir masa jabatannya mengangkat pembina baru. Garis besar permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Pura berdiri dengan Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 7 Februari 1959 yang dibuat dihadapan Raden Soeratman.
2. Undang-Undang Yayasan lahir, lalu memberikan pengaturan terkait jangka waktu kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan yang berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Ada dua undang yang mengatur jangka waktu yakni Undang-Undang 16 Tahun 2001 selama 5 Tahun dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 selama 3 Tahun.
3. Yayasan Pura terlambat melakukan penyesuaian, sehingga melakukan pembuatan yayasan baru dengan Anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Yayasan Pura Dwijawarsa Nomor 29 tanggal 25 April 2008.
4. Terdapat organ yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) memiliki masing-masing masa jabatan 5 tahun.
5. Organ yayasan berakhir masa jabatannya di tahun 2013, tetapi baru dilakukan pengangkatan pembina baru di tahun 2020 oleh pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya melalui Rapat gabungan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum atas pengangkatan tersebut.

Pengangkatan pembina baru dilaksanakan pada tahun 2020, sementara masing-masing organ dalam yayasan masa jabatannya habis di tahun 2013. Para organ yang melakukan

pengangkatan tidak mengetahui harus melakukan perpanjangan masa jabatan dan dalam setiap diadakan rapat dalam membahas program kerja Yayasan Pura tidak pernah membahas mengenai masa jabatan. Sehingga pengangkatan yang dilakukan melalui mekanisme rapat gabungan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.

Peraturan pelaksana suatu organisasi atau lembaga secara resmi diatur dalam anggaran dasar termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus. Organ dalam badan hukum tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan hukum yang dilaksanakannya menyebabkan timbulnya kerugian keperdataan terhadap pihak lain (Prasetya, R., 2012; Zaini, 2022). Pada waktu itu, keberadaan yayasan hanya didasarkan oleh kebiasaan. Hal tersebut kemudian berdampak pada beragamnya bentuk dan tata cara pendirian yayasan. Para ahli dan yurisprudensi menyatakan terdapat konsekuensi dalam hal pendirian yayasan dapat dilakukan dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan. Masyarakat menggunakan akta notaris dalam pendirian yayasan, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam peraturan tertulis. Kebiasaan dalam masyarakat, setelah penandatanganan akta pendirian yayasan oleh para pengurusnya dilanjutkan dengan pendaftaran ke kantor kepaniteraan pengadilan negeri tempat yayasan agar dapat diketahui oleh masyarakat (Subekti & Mulyono, 2011). Yayasan-yayasan yang lahir sebelum adanya undang-undang yayasan dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum.

Yayasan harus segera menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu tertentu (Krisna, 2021). Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait masih tetap dapat menjalankan berbagai kegiatannya. Yayasan diberi waktu paling lambat lima tahun untuk menyesuaikan anggaran dasarnya. Tetapi ketentuan tersebut diubah dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004, dengan mengubah ketentuan jangka waktu paling lambat 5 tahun menjadi 3 tahun. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 mengakui jika

badan hukum Yayasan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau yang mempunyai izin operasional dari instansi terkait, wajib melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan.

Anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Yayasan “Pura Dwijawarsa” Nomor 29 tanggal 25 April 2008 mengalami keterlambatan penyesuaian anggaran dasar. Yayasan Pura belum mengikuti aturan dalam Undang-Undang Yayasan, yaitu belum membuat penyesuaian anggaran dasar. Dalam *premise* akta Yayasan Pura tersebut tidak disebutkan jika yayasan tersebut merupakan lanjutan yayasan yang sama yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar di tahun 1959. Maka dari itu, dapat disimpulkan jika sebenarnya Yayasan Pura tersebut memiliki dua badan hukum yayasan yang berbeda. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terlambatnya penyesuaian anggaran dasar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Yayasan.

Badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara organ-organ tersebut sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Keputusan dari alat tersebut menjadi kehendak dari badan hukum itu sendiri, sehingga badan hukum akan menjadi nyata dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Teori organ merupakan bagian dalam teori badan hukum. Teori organ dikemukakan oleh lulusan sarjana Jerman, yaitu Otto Von Gierke, yang merupakan pengikut aliran sejarah, sedangkan di negeri Belanda teori ini dianut oleh L.G. Polano. Teori organ muncul akibat reaksi dari teori fiksi yang dikemukakan oleh Von Savigny. Otto Von Gierke mengatakan jika badan hukum itu seperti manusia, menjadi benar-benar nyata dalam pergaulan hukum.

Yayasan Pura dalam perjalanannya dalam menjalankan kegiatan sebagai badan hukum mengalami ketidaklengkapan orang yang menduduki jabatan sebagai organ yayasan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa orang yang menduduki organ yayasan telah meninggal dunia. Yayasan Pura yang dapat berperilaku seperti halnya manusia dan terlibat dalam pergaulan hukum dan dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya sesuai dengan teori organ yang dipersamakan dengan subyek hukum orang. Organ yayasan (pembina, pengurus, dan pengawas) dalam menjalankan

kegiatannya di Yayasan Pura sudah ditentukan terkait pembagian tugas dan kewenangan serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan tersebut. Pengaturan tersebut bertujuan agar terhindar dari konflik internal yayasan yang tidak hanya merugikan kepentingan yayasan sendiri tetapi juga dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan yayasan.

Pengisian kekosongan pembina dilaksanakan dengan pengangkatan pembina baru oleh anggota pengurus dan anggota pengawas. Pengangkatan pembina baru diperlukan karena memiliki kewenangan yang paling tinggi diantara organ yayasan lain seperti pengurus dan pengawas. Tugas utama dari pembina dalam yayasan adalah selalu mengontrol usaha pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Pengontrolan yang dilakukan pembina yayasan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai organ yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada organ yang lain. Anggaran Dasar Yayasan Pura menentukan jika pembina merupakan organ yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas, bahkan tidak dapat diserahkan kewenangan tersebut kepada pengurus dan pengawas. Maka dari itu, dalam Yayasan Pura perlu diangkat pembina baru agar tidak terjadi kekosongan pihak yang memiliki tugas untuk kegiatan yayasan guna mencapai kehendaknya sesuai dengan maksud dan tujuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Yayasan Pura.

Tiap jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama negara. Jabatan memiliki pengertian sebagai sebuah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum. Lingkungan tetap tersebut memiliki pengertian sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang dapat dinyatakan dengan tepat, teliti, dan bersifat *duurzaam*. Jabatan merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya jabatan tersebut dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum publik maupun hukum privat. Pengertian pejabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu (Poerwadarminta, 2003). Pejabat merupakan orang yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Sehingga pejabat (yang menduduki

jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan berjalan terus menerus, hal ini berarti jika pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi

Kewenangan merupakan apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan tersebut berasal dari apa yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan wajib dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, yaitu konstitusi, sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah bila dilihat dari sumber kewenangan itu lahir atau diperoleh, terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atributif berasal dari undang-undang/anggaran dasar yang memberikan wewenang kepada organ yayasan, sedangkan jika delegatif dan mandat merupakan pemberian wewenang oleh sesama organ pada organ lainnya. Atribusi dikatakan sebagai cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintah. Kewenangan atributif biasanya berasal dengan adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan (Brahmantya, 2021). Pelaksanaan kewenangan atributif ini dilakukan sendiri oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh peraturan dasarnya. Kewenangan tersebut melekat dan terus menerus serta dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam kewenangan atributif ini berada pada pejabat atau badan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasarnya.

Yayasan Pura dalam anggaran dasarnya memberikan pengaturan, dalam hal terjadi kekosongan anggota pembina, maka dalam waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan rapat gabungan antara anggota pengawas dan anggota pengurus. Anggaran Dasar Yayasan Pura memberikan wewenang secara jelas kepada anggota Pengawas dan anggota Pengurus untuk mengangkat anggota pembina jika terjadi kekosongan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Masalahnya pengurus yang mengangkat sudah habis masa jabatannya sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat. Konsekuensi hukum dari tindakan pengangkatan yang dilakukan tanpa wewenang tersebut adalah apabila terjadi kerugian akibat

pengangkatan tersebut menjadi tanggung jawab secara pribadi.

Undang-Undang Yayasan tidak memberikan jalan keluar jika salah satu unsur dalam melakukan Rapat Gabungan tidak terpenuhi. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri agar diizinkan mengangkat Pembina baru dan menghadap notaris. Yayasan Pura sudah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Kota Malang, permohonan tersebut diajukan di tanggal 6 Maret 2020, dengan nomor penetapan 383/Pdt.P/2020/PN.Mlg, Permohonan tersebut ditolak hakim dengan dasar pertimbangan bahwa permohonan dari para pemohon melalui kuasanya tidak diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009. Pengangkatan tersebut memang perlu dilakukan mengingat hal tersebut memiliki tujuan yang baik dan tidak merugikan yayasan serta pihak lain, karena apabila tidak diangkat pembina baru dan terjadi kekosongan pembina maka akan menghambat dalam mencapai maksud dan tujuan dari yayasan.

Pengangkatan pembina baru tersebut perlu dilakukan agar sesuai dengan teori organ dimana badan hukum layaknya sebagai manusia dalam menjalankan hak dan kewajibannya memerlukan organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Tetapi pengangkatan tersebut dilakukan organ yang tidak lagi memiliki masa jabatan, sehingga hal tersebut dilakukan di luar kewenangannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain dan tanggung jawab dapat dikenakan secara pribadi maupun tanggung renteng bila menyebabkan kerugian bagi yayasan maupun pihak lain.

Pengangkatan pembina baru setelah mengalami kekosongan yang cukup lama menyebabkan berbagai masalah. Ketentuan mengenai syarat dilakukan pengangkatan pembina baru adalah: (a) terjadi kekosongan pembina dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, (b) dilakukan rapat gabungan oleh pengurus dan pengawas. Kemudian anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan Pura tersebut mengadakan rapat gabungan yang diadakan secara internal yayasan yang kemudian notulen tersebut di bawa ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta

otentik. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh pengurus dan pengawas yang sudah berakhir kewenangannya dan dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan pembina. Pembina merupakan organ dalam yayasan yang memiliki kewenangan besar meliputi berbagai bidang kinerja yayasan, seperti sumber daya manusia, teknis, hukum, ekonomi, nasib hidup matinya yayasan. Pengangkatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Masa jabatan pembina tidak diatur dalam peraturan. Batas waktu menjabat bagi pembina yang berasal dari pendiri dapat seumur hidup kecuali meninggal dunia atau mengundurkan diri. Pembina yang menduduki organ yayasan bukan berasal dari pendiri tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Yayasan. Alasan dari masa jabatan pembina yang berasal dari pendiri tidak ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan karena merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada yang bersangkutan, ketika yang bersangkutan mendirikan yayasan dilakukan dengan menyisihkan harta kekayaan pribadinya, lalu secara ekonomis tidak mendapatkan keuntungan dalam pendirian yayasan selain untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah jika dalam menjalankan masa jabatannya pembina yang berasal dari pendiri tersebut meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir dan pembina dari pendiri sudah tidak ada lagi, maka secara otomatis mereka yang menjabat sebagai pembina ada yang bukan merupakan pendiri yayasan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah mereka yang bukan berasal dari pendiri tersebut memerlukan jangka waktu dalam menjalankan jabatannya ataukah mengikuti pengaturan terkait pembina yang berasal dari pendiri, yaitu dengan tidak memiliki jangka waktu masa jabatan atau seumur hidup.

Masa jabatan Pembina sebaiknya tidak dibatasi jangka waktunya untuk menghindari terjadinya kekosongan kewenangan dalam melakukan pengangkatan karena masing-masing jabatan dari organ yayasan telah habis. Undang-Undang Yayasan memang tidak mengatur terkait masa jabatan pembina, tetapi mengatur mengenai masa jabatan masing-masing organ pengurus dan organ pengawas yaitu selama lima tahun. Dengan pemikiran tersebut, mencegah apabila masing-masing organ tersebut sama-sama

berakhir masa jabatannya dan terdapat kekosongan organ, maka tidak ada organ yang memiliki kewenangan untuk mengangkat. Kesepakatan memilih pembina lebih dari satu orang dapat menjadi alternatif untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan pembina. Apabila anggota pembina hanya satu dan meninggal dunia maka kewenangan berada pada organ pengurus dan pengawas melalui Rapat Gabungan sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.

Kepastian hukum menurut Aristoteles merupakan satu komponen penting dalam pelaksanaan hukum. Tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), peraturan/ketentuan umum diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. (Rahardjo, 2000). Hukum memiliki tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Yayasan Pura telah melakukan pengangkatan pembina baru di tahun 2020 yang kemudian membuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris. Notaris memiliki kewenangan sebagai pembuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh perundang-undangan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Keberadaan akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang melekat pada akta tersebut. Pengangkatan pembina dengan pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya yang sudah dinyatakan dalam akta notaris berupa akta pernyataan keputusan rapat belum memberikan kepastian hukum bagi yayasan dan juga Yayasan Pura. Anggaran dasar yang ada belum mengatur organ yayasan dan jangka waktu menjabatnya. Anggaran dasar memiliki kedudukan penting karena menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dan maksud didirikannya yayasan. Anggaran dasar menjadi hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku dalam

yayasan. Kepastian hukum dalam pengangkatan pembina yayasan pura juga tidak terpenuhi karena pengangkatan tersebut dilakukan oleh anggota pengurus dan anggota pengawas yang tidak lagi memiliki kewenangan karena sudah berakhir jangka waktu menjabat.

Indikator terciptanya kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut juga dilaksanakan dengan baik oleh petugas hukum. Situasi yang tidak mendukung tercapainya kepastian hukum di Yayasan Pura adalah pengangkatan pembina yang dilakukan oleh organ yang tidak berwenang mengangkat. Perubahan anggaran dasar perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan pembina Yayasan Pura, khususnya terkait pengaturan jangka waktu masa jabatan. Permasalahan terkait apa akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan pembina Yayasan Pura oleh anggota pengurus dan anggota pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya. Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Pada dasarnya pengangkatan pembina karena kekosongan pembina merupakan kewenangan dari anggota pengurus dan anggota pengawas, tetapi anggota pengurus dan anggota pengawas tersebut sudah habis jangka waktu menjabat sebagai organ. Pengangkatan yang dilakukan tersebut juga lebih dari jangka waktu 30 hari sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Pura. Sebenarnya dalam Undang-Undang Yayasan tidak memberikan penjelasan jika terdapat pengangkatan yang dilakukan lebih dari 30 hari tersebut, mengenai konsekuensi hukumnya, sanksi yang diberikan maupun jalan keluar yang diberikan apabila pengangkatan tersebut sudah dilakukan.

Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan pembina yayasan oleh pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya cukup rawan. Masalah yang timbul diantaranya: (a) jabatan pembina tidak sah, (b) pembina yang diangkat tidak memiliki kewenangan, (c) perbuatan hukum yang dilakukan tidak sah, dan (d) dapat digugat apabila ada yang dirugikan, (e) pernyataan keputusan rapat dapat terdegradasi bukan sebagai akta otentik, (f) pertanggungjawaban ke pribadi apabila ada

kerugian yang harus ditanggung. Pengangkatan yang dilakukan tidak sah/tidak memiliki legalitas di mata hukum karena dilakukan oleh organ pengurus dan organ pengawas yang tidak memiliki kewenangan karena sudah berakhir jangka waktu menjabatnya dalam yayasan. Pembina yang sudah diangkat tidak memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pembina dalam yayasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya (Warsifah, 2022). Perbuatan-perbuatan hukum dengan maksud menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pembina dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi yayasan maupun pihak lain. Akibat dari pengangkatan yang dilakukan oleh organ yang tidak memiliki kewenangan lagi, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pengangkatan tersebut.

Secara norma pengangkatan tersebut sebenarnya tidak sah karena tidak lagi dalam ranah kewenangannya. Akan tetapi, terdapat alasan pembenar menjadi sah yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.06-0027577, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pura berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 53 tanggal 6 September 2021. Penerbitan keputusan terhadap pengangkatan pembina tersebut dapat menjadi sahnya pengangkatan secara hukum.

SIMPULAN

Pengangkatan pembina oleh pengurus dan pengawas yang sudah berakhir masa jabatannya dilaksanakan melalui mekanisme rapat yang dicatatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan notaris. Pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan teori organ akan tetapi tidak sesuai dengan teori kewenangan. Akibat hukum terhadap pengangkatan pembina oleh pihak yang sudah tidak menjabat menyebabkan tidak sahnya pengangkatan jabatan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan berdasarkan akta Keputusan Rapat yang dicatatkan di notaris menjadi alternatif sahnya pengangkatan pembina. Diperolehnya pengesahan dari Menteri dapat menjadi alasan pembenar jika pengangkatan tersebut sah secara hukum. Tetapi jika dilihat

secara norma, pengangkatan oleh organ yang tidak memiliki kewenangan dikatakan tidak sah.

DAFTAR RUJUKAN

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 164 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dihadapan A. A Gde Wahyu Anggara, S. H., M. Kn.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 53 tanggal 6 September 2021 yang dibuat dihadapan A. A Gde Wahyu Anggara, S. H., M. Kn.
- Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat dihadapan notaris Niluh Elita Mahariany, S. H., M. Kn.
- Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Yayasan Pura Nomor 29 tanggal 25 April 2008 yang dibuat dihadapan notaris Niluh Elita Mahariany, S. H., M. Kn.
- Anggaran Dasar Yayasan Pura Dwijawarsa Nomor 13 tanggal 7 Februari 1959 yang dibuat dihadapan Raden Soeratman
- Brahmantya, I.B.B., (2021). Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan Yang Lalai Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 215-225.
- Handayani, D., dkk, (2018). Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Jurnal Kependidikan Islam*, 8(1), 21-29.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0027577, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pura berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 53 tanggal 6 September 2021 yang dibuat dihadapan A.A Gde Wahyu Anggara, S.H., M.Kn
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3760.AH.01.02.Tahun 2008, yang memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian dan Akta Perubahan
- Krisna, R., (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 41-47.
- Kristianti, D.S., (2021). Menelisik Yayasan di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi dan Tujuan Sosial Semata?. *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan*, 6(1), 1-32.
- Kusumastuti, A., & Suhardiadi, M., (2003). *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi: Jakarta.
- Murni, & Gani, A., (2020). Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Failednya Suatu Yayasan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(1), 38-46.
- Poerwadarminta. W.J.S, (2003). *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Prasetya, R., (2012). *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S., (2000). Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rido, R. A., (2004). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. PT Alumni: Bandung.
- Sanjaya, U.H., (2016). Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial Pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah di Yogyakarta). *Asy-Syir 'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 537-563.
- Siahaan, N., dkk, (2020). Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 1-10.
- Simamora, Y.S., (2012). Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(2), Agustus, 175-186
- Subekti dan Mulyoto, (2011). *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*. Cakrawala Media: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan*

- atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
- Wahyono, L.B., & Margono, S., (2001). *Hukum Yayasan antara Fungsi Karikatif atau Komersial*. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta.
- Warsifah, & Lakie, V.F., (2021). Pertanggungjawaban Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 129-139.
- Zaini, Z.D., & Septia, P., (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 35-44.